

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan pengelolaan dan pelestarian hutan yang berkelanjutan telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Salah satu kebijakan penting adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus, seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, kegiatan keagamaan, dan budaya. Kawasan-kawasan ini ditetapkan sebagai hutan tetap yang keberadaannya harus terus dipertahankan, baik sebagai hutan lindung, hutan konservasi, maupun hutan produksi. Salah satu kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan regulasi tersebut adalah Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Malili (KLHK, 2018).

Penetapan kawasan ini diawali dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 275/Kpts-1/1994 yang menunjuk beberapa lokasi di Sulawesi Selatan sebagai Stasiun Penelitian dan Uji Coba (SPUC). Kemudian, status SPUC Malili diubah menjadi KHDTK melalui SK Menteri Kehutanan No. 367/Menhut-II/2004, dengan luas kawasan 737,7 hektar yang mewakili ekosistem hutan tropis basah. KHDTK Malili terletak di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dan berbatasan langsung dengan empat desa: Desa Ussu, Puncak Indah, Balantang, dan Baruga (BPK, 2012). Secara ekologis, KHDTK Malili memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Hasil penelitian Tim Penyusun Master Plan KHDTK Malili tahun 2013–2017 menunjukkan bahwa kawasan ini cocok dikembangkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan ekowisata. Beberapa areal menunjukkan pertumbuhan vegetasi eksotik dan alami yang dapat dijadikan objek perbandingan dalam riset ilmiah. Selain itu, terdapat potensi wisata edukatif melalui pemanfaatan hutan sebagai lokasi studi lapangan oleh institusi pendidikan, serta kawasan perbukitan di bagian selatan yang menyajikan pemandangan lembah dan berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata alam (BPK, 2012).

Keanekaragaman flora dan fauna di kawasan ini turut memperkuat nilai ekologisnya. Berdasarkan inventarisasi biofisik, ditemukan berbagai jenis tumbuhan pada seluruh strata (semai hingga pohon), dengan tingkat kerapatan tinggi. Spesies pohon komersial seperti Betao, Damar Mata Kucing, dan Nato Putih juga ditemukan di kawasan ini. Dari sisi fauna, terdapat spesies penting seperti Kera Hitam (*Macaca tongkeana*), Tarsius, Biawak (*Varanus salvator*), dan berbagai jenis burung endemik. Namun demikian, lokasi KHDTK yang berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat juga menghadirkan tantangan tersendiri (BPK, 2012).

Aktivitas pemanfaatan kawasan oleh masyarakat sekitar meliputi pertanian sistem *agroforestry*, pemungutan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), hingga praktik ilegal seperti okupasi lahan dan penebangan liar. Aktivitas ini kerap kali bertentangan dengan tujuan awal penetapan KHDTK sebagai areal konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan temuan Wakka (2014), yang menyatakan bahwa konflik pemanfaatan sering terjadi di berbagai KHDTK lain seperti di Mengkendek, Tana Toraja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan KHDTK

memerlukan pendekatan kolaboratif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan menjadi sangat penting.

Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan kelembagaan dapat menjadi kunci dalam menjaga kelestarian dan fungsi kawasan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, analisis *stakeholder* menjadi langkah krusial untuk memahami kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak dalam pengelolaan kawasan. Melalui analisis ini, dapat dipetakan peran, relasi, dan potensi konflik atau kolaborasi antar pihak. Seperti dijelaskan oleh Fibriantingtyas (2020), keberhasilan pengelolaan kawasan hutan sangat ditentukan oleh keterlibatan para pihak yang berperan langsung, baik secara formal maupun informal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis *stakeholder* untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan KHDTK Malili. Model analisis yang digunakan adalah menggunakan matriks dua dimensi untuk memetakan posisi *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh (*Influence*) dan kepentingan (*Interest*). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang strategi keterlibatan *stakeholder* yang lebih efektif dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada KHDTK Malili di masa depan.

1.2 Teori

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan salah satu bentuk penetapan kawasan hutan yang memiliki fungsi strategis untuk mendukung kepentingan umum, seperti kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan religius, tanpa mengubah fungsi pokok hutan tersebut. KHDTK dapat mencakup berbagai tipe ekosistem hutan, baik hutan tanaman, hutan sekunder, maupun hutan primer, dan tetap memiliki nilai jasa lingkungan yang signifikan sebagaimana kawasan hutan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 8, pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan KHDTK sebagai sarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ilmiah, edukatif, dan kultural, tanpa mengganggu fungsi utama kawasan hutan yang bersangkutan (Esa, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan mengatur bahwa penetapan KHDTK dapat dilakukan pada hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi, selama diperuntukkan bagi kepentingan umum di bidang penelitian, pendidikan, sosial, religius, dan budaya. Pengelolaan KHDTK berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan lokasi penelitian ini, kawasan yang dikaji terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Hutan Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Sebagian dari kawasan hutan ini telah resmi ditetapkan sebagai KHDTK dan menjadi objek penelitian yang merepresentasikan pengelolaan hutan berbasis fungsi multipel untuk kepentingan strategis non-komersial.

Berdasarkan hasil penelitian Tim Penyusun Master Plan KHDTK Malili 2013-2017, ditemukan areal dengan vegetasi *Acacia mangium* yang berumur lebih dari 10 tahun tumbuh dengan jenis-jenis pioneer alami seperti *Litsea* sp., *Calicarpa* sp., yang dapat dijadikan lokasi penelitian untuk memperbandingkan antara laju pertumbuhan

jenis-jenis alami dan jenis-jenis eksotik yang ditanam. Untuk identifikasi kondisi biofisik flora dari Tim Penyusun Master Plan KHDTK Malili 2013-2017 ditemukan beragam jenis tumbuhan, mulai dari semai, pancang, tiang dan pohon. Kerapatan vegetasi ditingkat pohon memiliki kerapatan 226 individu/hektar, tingkat tiang 535 individu/hektar, tingkat pancang 3.428 individu/hektar dan tingkat semai 28.928 individu/hektar. Beberapa pohon komersial seperti Betao (*Calophyllum Soulattri burm.F*), Damar Mata Kucing (*Hoopea dolosa* V.SI), Konroniu, Nato (*Palaquium* sp), Nato Putih (*Palaquium bataanense* Merr) dan Tapi-Tapi (*Santria Laevigata* BL. Forma). Kondisi biofisik dari hasil inventarisasi fauna, ditemukan beberapa species kunci di KHDTK Malili, yaitu jenis Kera Hitam (*Macaca tongkekana*), Tarsius (belum diketahui jenis/nama latinnya), biawak (*Varanus salvator*) dan berbagai jenis burung (BPK, 2012). Tingginya biodiversitas ini menambah nilai ekologis KHDTK Malili juga meningkatkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan kawasan. Hal ini mencerminkan perlunya pendekatan partisipatif dalam pengelolaan kawasan, guna menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan kelestarian ekosistem dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan, masyarakat yang secara langsung memanfaatkan kawasan hutan, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan hutan.

1.2.1 Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas suatu organisasi atau perusahaan dan, dalam banyak kasus, dipengaruhi secara langsung oleh keputusan dan operasionalnya. Berbagai studi yang mengkaji perspektif *stakeholder* dalam konteks ekonomi umumnya menitikberatkan pada penciptaan nilai (*value creation*) yang dilaporkan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Sebagian besar literatur mengenai teori *stakeholder* juga menunjukkan bahwa pemangku kepentingan memiliki peran aktif dalam mengelola relasi dengan perusahaan demi mencapai tujuan mereka masing-masing (Fuadah dan Hakimi, 2020).

Teori *stakeholder* menegaskan bahwa pihak yang terlibat tidak semata-mata beroperasi demi kepentingan internal melainkan harus mampu memberikan manfaat yang seimbang kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat umum, analis, dan entitas lainnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pihak tersebut. Oleh karena itu, keberlanjutan dan eksistensi suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan serta persepsi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap aktivitas perusahaan tersebut. Tingkat kekuasaan atau pengaruh pemangku kepentingan serta kebutuhan mereka akan transparansi informasi menjadi indikator penting dalam menjelaskan variasi bentuk dan intensitas pengungkapan sosial yang dilakukan oleh para pihak kepada publik (Susanti *et al.*, 2022).

Analisis terhadap peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan merupakan langkah penting dalam memahami dinamika pengelolaan suatu kawasan, termasuk KHDTK Malili. Proses analisis *stakeholder* umumnya dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat atau memiliki kepentingan terhadap kawasan tersebut. Kedua, pengelompokan atau pengkategorian *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan, pengaruh, dan hubungan mereka

terhadap pengelolaan kawasan. Ketiga, analisis terhadap pola hubungan dan interaksi antar-pihak untuk mengetahui potensi kolaborasi, konflik, atau ketergantungan di antara mereka. Ketiga tahapan ini esensial untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana peran, kepentingan, serta kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung pengelolaan KHDTK secara berkelanjutan. Dengan demikian, strategi pengelolaan dapat dirancang lebih efektif dan partisipatif, berdasarkan pemahaman terhadap struktur sosial dan jaringan pengaruh yang ada di sekitar kawasan tersebut (Subhan *et al.*, 2022).

Tahapan kedua dalam analisis pemangku kepentingan adalah proses pengelompokan dan pengkategorian berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak terhadap pengelolaan KHDTK yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan lingkungan. Proses klasifikasi ini dilakukan dengan mengukur nilai pengaruh dan kepentingan setiap pihak, yang kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Hasil analisis tersebut divisualisasikan dalam bentuk kuadran untuk memetakan posisi serta peran relatif masing-masing pihak dalam konteks pengelolaan KHDTK yang berkelanjutan.

Pengkategorian analisis merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan hasil observasi terhadap dinamika pengelolaan. Melalui pendekatan ini, pemangku kepentingan dapat dipetakan ke dalam empat kategori utama dalam kuadran analisis, yaitu *key players* (aktor kunci), *context setters* (penentu konteks), *subjects* (pihak terdampak), dan *crowd* (pihak dengan pengaruh dan kepentingan rendah). Kategorisasi ini memfasilitasi pemahaman strategis terhadap peran *stakeholder* dalam mendukung keberhasilan program pengelolaan KHDTK Malili yang inklusif dan berkelanjutan (Subhan *et al.*, 2022).

1.2.2 Matriks Pengaruh dan Kepentingan

Setiap pemangku kepentingan memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang bervariasi terhadap suatu kebijakan atau proyek. Variasi ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan grid model sebagaimana dikembangkan oleh Bryson (2004) dan menurut Reed *et al.*, (2009) yang menitikberatkan pada dua dimensi utama, yaitu pengaruh (*Influence*) dan kepentingan (*Interest*). Dimensi *power* merujuk pada kapasitas *Stakeholder* untuk memengaruhi keputusan atau arah kebijakan, yang dapat bersumber dari posisi strategis dalam organisasi, kendali atas sumber daya, atau legitimasi sosial seperti keahlian dan reputasi sebagai pemimpin opini. Sementara itu, *interest* mencerminkan sejauh mana pemangku kepentingan memiliki perhatian dan keterlibatan terhadap isu atau kebijakan tertentu. Analisis terhadap kedua dimensi ini penting untuk memetakan posisi *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan serta menentukan strategi keterlibatan yang sesuai (Leni *et al.*, 2021).

Model klasifikasi *power-interest grid*, *power-influence grid*, maupun *influence-interest grid* merupakan alat analitis yang digunakan untuk memetakan pemangku kepentingan berdasarkan kombinasi antara tingkat kekuasaan, kepentingan terhadap hasil, serta kemampuan mereka dalam memengaruhi atau dipengaruhi oleh pelaksanaan suatu proyek. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi terhadap aktor-aktor strategis yang memiliki potensi untuk mendukung, menghambat, atau membentuk arah pelaksanaan proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Model ini

sangat berguna terutama dalam konteks proyek berskala kecil atau pada situasi di mana struktur hubungan antar pemangku kepentingan relatif sederhana. Dengan memanfaatkan grid tersebut, pengelola proyek dapat menyusun strategi komunikasi dan partisipasi yang lebih tepat sasaran, serta mengelola dinamika kekuasaan secara lebih efektif demi mendukung keberhasilan program yang dirancang. Dalam model grid, *stakeholders* yang terlibat dikelompokkan dalam empat kuadran (*two-by-two matrix*), yaitu *Subjects*, *Key Players*, *Context Setters*, dan *Crowd*. (Tomasoa et al., 2024).

Dalam kerangka *influence-interest grid*, pemangku kepentingan diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama berdasarkan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuasaan atau pengaruh (*Influence*) mereka terhadap suatu kebijakan atau proyek (Leni et al., 2021):

1. Pengaruh Rendah – Kepentingan Tinggi (*Subjects*): Kategori ini mencakup pihak yang memiliki perhatian atau kepentingan yang tinggi terhadap isu tertentu, namun tidak memiliki kewenangan atau kapasitas yang memadai untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Rendahnya tingkat kekuasaan ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia, tidak adanya peran yang formal dalam struktur kelembagaan, atau karena kapasitas institusional yang terbatas.
2. Pengaruh Tinggi – Kepentingan Tinggi (*Key Players*): Pihak dalam kategori ini merupakan aktor kunci yang tidak hanya memiliki perhatian besar terhadap proyek atau kebijakan, tetapi juga memiliki kapasitas dan otoritas untuk turut serta secara aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Mereka memiliki pengaruh strategis dan sumber daya yang cukup untuk mendorong atau menghambat keberhasilan program.
3. Pengaruh Tinggi – Kepentingan Rendah (*Context Setters*): Kelompok ini terdiri dari pihak yang memiliki tingkat pengaruh yang tinggi, namun tidak menunjukkan keterlibatan atau kepentingan yang signifikan terhadap isu yang sedang dibahas. Meski demikian, peran mereka tetap krusial karena keputusan yang mereka ambil atau arah kebijakan yang mereka dukung dapat berdampak besar terhadap keberhasilan proyek, meskipun secara langsung mereka tidak terdorong oleh kepentingan personal.
4. Pengaruh Rendah – Kepentingan Rendah (*Crowd*): Pihak yang tergolong dalam kelompok ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang relatif rendah. Mereka mungkin terdampak secara tidak langsung oleh proyek, namun keterlibatan aktif mereka cenderung terbatas. Meskipun demikian, keberadaan mereka tetap perlu diperhatikan, terutama dalam konteks partisipasi sosial dan legitimasi proses kebijakan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

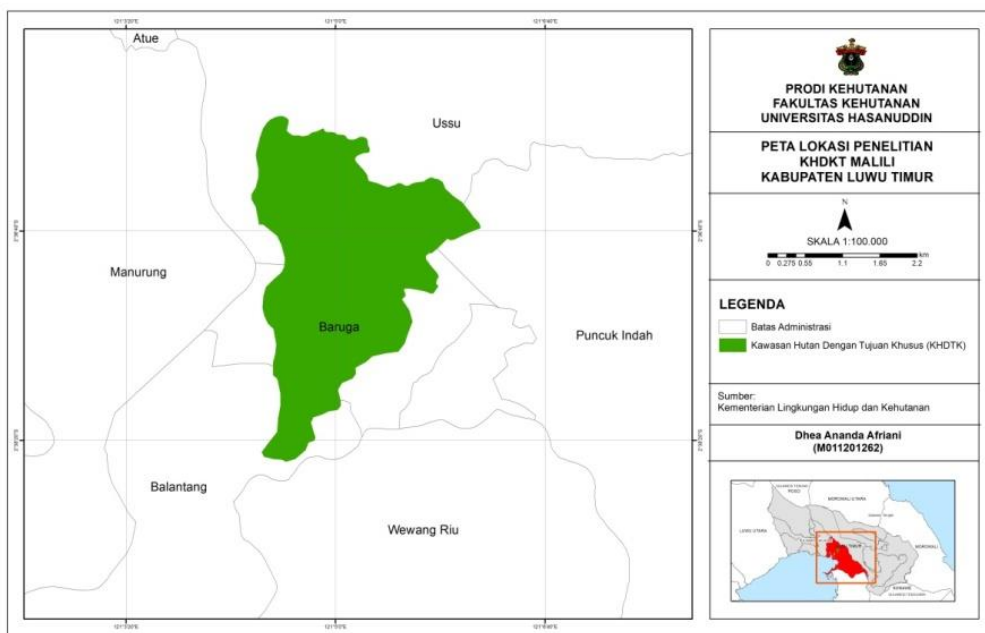
1. Mengidentifikasi *stakeholder* dalam pengelolaan KHDTK Malili.
2. Menganalisis peran *stakeholder* dalam pengelolaan KHDTK Malili.
3. Memetakan *stakeholder* berdasarkan pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*) dalam pengelolaan KHDTK Malili.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi untuk mengetahui *stakeholder* dalam pengelolaan KHDTK Malili yang berpengaruh dan mempunyai kepentingan dalam pengelolaan KHDTK Malili dan juga bahan pertimbangan bagi BPSI LHK Makassar dalam mengelola KHDTK Malili sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-November 2023 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk memperoleh informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan KHDTK Malili.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

KHDTK Malili berjarak kurang lebih 520 km arah utara Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. KHDTK Malili meliputi 4 Desa dalam satu kecamatan yang sama (Kecamatan Malili) yaitu Desa Ussu, Desa Puncak Indah, Desa Balantang dan Desa Baruga. Luas KHDTK Malili adalah 737,7 ha yang mewakili ekosistem hutan tropis basah dengan ketinggian tempat 30 – 307 mdpl. Secara geografis KHDTK terletak antara 2°36'20" - 2°38'40" lintang selatan dan 121°3'20" - 121°6'40" bujur timur.

1.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuisi, digunakan untuk memandu dan memastikan pertanyaan terstruktur sesuai tujuan analisis *stakeholder*.
2. Alat tulis, digunakan untuk menulis dan mencatat setiap informasi dari informan.
3. *Handphone*, digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan penulis dan merekam suara saat wawancara.

1.3 Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan responden yang merupakan unit sampel yang diberikan kuisi dan wawancara pada penelitian ini sebagai berikut:

Populasi merujuk pada jumlah keseluruhan individu atau objek dalam suatu kelompok atau populasi tertentu. Dalam konteks *stakeholder*, populasi merujuk pada jumlah keseluruhan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan KHDTK Malili. Penelitian ini menggunakan populasi semua masyarakat sekitar kecamatan Malili terkhusus pada desa yang berbatasan langsung dengan KHDTK Malili, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Balai Pengendalian Perubahan Iklim, serta BPSI LHK Makassar sebagai pengelola KHDTK. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik *purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih responden atau sampel berdasarkan karakteristik pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan berperan dalam pengelolaan KHDTK Malili. Sampel dalam penelitian ini adalah perwakilan masing-masing dari 9 kelompok *stakeholder* dengan perwakilan BPSI LHK Makassar/pengelola KHDTK Malili 2 orang, masyarakat sekitar KHDTK sebanyak 32 orang, dan masing-masing dari pihak Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Dinas Pariwisata Keperguruan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, KPH Larona, Balai Pengendalian Perubahan Iklim (Daops Malili-Luwu Timur) sebanyak 1 orang, sehingga total sampel sebanyak 45 responden.

2.4 Jenis Data

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, maka penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

- 1) Data primer adalah data yang diambil secara langsung mencakup data hasil wawancara bersama masyarakat dan *stakeholder* yang terkait dalam pengelolaan KHDTK Malili. Diketahui bahwa terdapat penentuan informan yang akan diwawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pengambilan informan dengan disengaja). Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memilih informan yang memiliki keterlibatan langsung, pengetahuan memadai, serta pengalaman relevan terhadap pengelolaan KHDTK Malili dengan mempertimbangkan kewenangan formal, keterlibatan langsung atau tidak langsung, kapasitas dalam pengambilan keputusan atau pengaruh terhadap kebijakan, serta pengetahuan *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud adalah semua pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan KHDTK Malili dan dipandang potensial untuk bisa bekerjasama mengembangkan KHDTK Malili. Adapun pihak-pihak terkait yang diduga memiliki kepentingan dalam pengelolaan KHDTK Malili, diantaranya :
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur
 - b. Balai Pengendalian Perubahan Iklim (Daops Malili-Luwu Timur)
 - c. BPSI LHK Makassar / Pengelola KHDTK Malili
 - d. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur
 - e. Dinas Pariwisata, Keperguruan dan Olahraga, Kab Luwu Timur
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur
 - g. KPH Larona
 - h. Masyarakat sekitar KHDTK
 - i. PDAM Kab. Luwu Timur

- j. Pemerintah Desa
 - k. Pemerintah Kecamatan
- 2) Data sekunder dikumpulkan dengan cara penelusuran dokumen dan pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data kondisi umum KHDTK Malili, data tentang program kerja/kegiatan dan sumberdaya *stakeholder* yang diperlukan untuk menunjang pengelolaan KHDTK Malili, dan penelusuran pustaka mengenai analisis data *stakeholder*.

2.5 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

2.5.1 Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait yang telah diidentifikasi dengan format pertanyaan yang telah disiapkan. Topik yang dibahas mengenai peran dan kepentingan responden terhadap KHDTK Malili. Waktu dan tempat dilakukan wawancara dimulai pada Juni 2023 dengan metode fleksibel atau menyesuaikan waktu dan kesediaan responden. Wawancara dilakukan langsung terhadap responden secara *face to face* dengan metode wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, dilakukan secara sistematis dan setiap responden diwawancarai dengan pertanyaan yang sama namun mendapat ruang untuk menambahkan pertanyaan tambahan atau mendalami topik tertentu sesuai dengan respons dari responden.

2.5.2 Observasi

Observasi yang dilakukan adalah pengamatan tidak-terstruktur dengan mencatat dan mengamati kelompok masyarakat penggarap lahan dan lingkungan sekitar yang menjadi tujuan penelitian. Pengamatan yang dilakukan adalah mengamati potensi KHDTK Malili dan keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar KHDTK Malili.

2.6 Analisis Data

Analisis adalah proses berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponennya sehingga dapat mengenal ciri-ciri komponen, hubungannya dengan yang lainnya, dan fungsi masing-masing dalam keseluruhan yang terpadu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses berpikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu konflik dari satu unit ke unit terkecilnya (Ali, 2018). Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk mengidentifikasi pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam pengelolaan KHDTK Malili. Setelah identifikasi awal dilakukan, pihak yang telah terduga tersebut diwawancarai untuk mendapatkan data kualitatif mengenai pandangan, kepentingan, serta pengaruh mereka terhadap KHDTK Malili

Data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk merangkum pola, tema, dan kecenderungan yang ditemukan dalam wawancara, serta memberikan gambaran umum tentang persepsi dan peran masing-masing *stakeholder*. Hasil dari analisis deskriptif tersebut diubah menjadi data kuantitatif dengan menerapkan *One Score-One Indicator System*, di mana setiap indikator yang ditemukan dari analisis deskriptif diberi

nilai menggunakan skala Likert dengan rentang 1-5. Skala ini menggambarkan tingkat pengaruh atau kepentingan masing-masing *stakeholder*, kriteria skoring 1-5 dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Matriks Kriteria untuk Penilaian Pengaruh dan Kepentingan

Skor	Rata-Rata	Kriteria	Deskripsi
Pengaruh <i>Stakeholder</i>			
5	5	Sangat Tinggi	Sangat berpengaruh dalam pengelolaan KHDTK Malili
4	4,9 – 4	Tinggi	Berpengaruh dalam pengelolaan KHDTK Malili
3	3,9 – 3	Cukup Tinggi	Cukup berpengaruh dalam pengelolaan KHDTK Malili
2	2,9 – 2	Rendah	Kurang berpengaruh dalam pengelolaan KHDTK Malili
1	1,9 – 0	Sangat Rendah	Tidak berpengaruh atau memiliki kepentingan yang minim dalam pengelolaan KHDTK Malili
Kepentingan <i>Stakeholder</i>			
5	5	Sangat Tinggi	Sangat berkepentingan dalam pengelolaan KHDTK Malili
4	4,9 – 4	Tinggi	Berkepentingan dalam pengelolaan KHDTK Malili
3	3,9 – 3	Cukup Tinggi	Cukup berkepentingan dalam pengelolaan KHDTK Malili
2	2,9 – 2	Rendah	Kurang berkepentingan dalam pengelolaan KHDTK Malili
1	1,9 – 0	Sangat Rendah	Tidak berkepentingan atau memiliki kepentingan yang minim dalam pengelolaan KHDTK Malili

Skoring terhadap pengaruh (*influence*) *stakeholder* dilakukan dengan parameter: pengaruh atau peran, tujuan yang mereka miliki, upaya pencegahan terhadap pengrusakan areal, kegiatan rehabilitasi, serta tingkat kewenangan yang dimiliki. Skor total tersebut digunakan untuk membuat model pemetaan *stakeholder*, dengan memetakan hasilnya ke dalam kuadran berdasarkan dua dimensi utama yakni pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*). Dengan memetakan hasil ke dalam kuadran, *stakeholder* dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu *Key Players*, *Subjects*, *Context Setters* dan *Crowd*. Model pemetaan *stakeholder* ini memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi dan prioritas tiap pihak dalam proses pengelolaan KHDTK Malili, yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam strategi keterlibatan pihak.